

## Peran Multi-Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik Daerah: Analisis Model Collaborative Governance di Kota Pariaman

Silvina Tri Dewi<sup>1</sup>, Nora Eka Putri<sup>2</sup>, Lince Magriasti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia  
email: silvinatridewi88@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in public policy formulation in Kota Pariaman within the decentralization era. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and adopts a library research design. Data were collected from official documents of the Kota Pariaman Government, including the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), Local Government Accountability Reports (LKPP), Regional Regulations, Mayor Regulations, Development Planning Forums (Musrenbang) documents, as well as relevant scientific articles and publications. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, guided by the collaborative governance framework developed by Ansell and Gash. The findings reveal that public policy formulation in Kota Pariaman involves three major groups of actors, namely government institutions, the private sector, and civil society, through mechanisms such as Musrenbang, Focus Group Discussions (FGDs), and public consultations. However, the collaboration still faces several challenges, including government dominance in decision-making, unequal actor capacities, and limited information transparency. The study highlights that the success of collaborative governance is not solely determined by formal institutional design but is also significantly influenced by social capital and the integration of Minangkabau local wisdom values into the policy formulation process. This finding contributes theoretically to the development of collaborative governance studies within the context of local government based on socio-cultural values.*

**Keywords:** Collaborative governance, policy formulation, multi-actor, decentralization, Pariaman City



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

---

### Pendahuluan

Era desentralisasi di Indonesia telah membawa perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kebijakan otonomi

daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Pratama, 2022). Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemampuan tata kelola yang memadai agar mampu merespons dinamika sosial yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan kapasitas fiskal, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hidayat, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun tata kelola yang partisipatif, kolaboratif, dan akuntabel.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjawab kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah *collaborative governance*. Konsep ini menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal dalam proses pengambilan keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membangun kerja sama dengan berbagai aktor, seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga adat. Menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), *collaborative governance* merupakan pengaturan tata kelola yang melibatkan aktor publik dan non-publik secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, serta ditujukan untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *collaborative governance* semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah publik yang kompleks, khususnya pada sektor pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pengelolaan lingkungan, maupun perencanaan pembangunan daerah (Nugroho, 2024). Namun demikian, keberhasilan implementasi *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi, tingkat kepercayaan antaraktor, kepemimpinan kolaboratif, serta dukungan regulasi yang memadai.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan

yang khas. Sebagai kota yang memiliki luas wilayah relatif kecil dengan jumlah penduduk sekitar 98 ribu jiwa, Kota Pariaman menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan kawasan pesisir, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pariaman 2025 (Pariaman, 2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman mencapai 79,42 dan termasuk kategori tinggi. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 4,11%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan daerah, namun tetap memerlukan penguatan tata kelola untuk menjamin keberlanjutan pembangunan secara inklusif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Pariaman telah mengembangkan berbagai mekanisme partisipatif melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, serta pelibatan unsur masyarakat dan lembaga adat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, pemerintah kota juga mendorong pengembangan inovasi daerah dan transformasi birokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam proses pembangunan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan daerah.

Namun demikian, implementasi *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, belum seluruh organisasi perangkat daerah memiliki kapasitas yang sama dalam membangun kolaborasi dengan aktor non-pemerintah. Kedua, mekanisme pelibatan masyarakat masih belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga kualitas partisipasi antar sektor menjadi berbeda-beda. Ketiga, terdapat perbedaan kapasitas dan sumber daya antaraktor yang berpotensi memengaruhi kualitas masukan dalam proses formulasi kebijakan (Saputra, 2023). Selain itu, koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat masih memerlukan penguatan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kota Pariaman memiliki modal sosial yang cukup kuat berupa keberadaan lembaga adat dan nilai-nilai budaya lokal yang masih terpelihara dengan baik. Salah satu konsep yang sering dijadikan landasan sosial dalam pengambilan keputusan adalah nilai-nilai musyawarah yang berkembang dalam sistem adat Minangkabau, termasuk prinsip *Luhak nan Tigo* yang menekankan pentingnya kesepakatan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap norma sosial dalam kehidupan masyarakat (Yunus, 2021). Integrasi antara sistem administrasi modern dan nilai-nilai lokal tersebut berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan model *collaborative governance* yang sesuai dengan karakteristik Kota Pariaman.

---

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam berbagai konteks. Penelitian Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Emerson et al., 2012) mengembangkan kerangka *Collaborative Governance Regime* yang menjelaskan pentingnya dinamika kolaborasi, kapasitas tindakan bersama, dan hasil kolaborasi dalam tata kelola publik. Di Indonesia, penelitian Fauzi (Fauzi, 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah, sedangkan penelitian Wibowo (Wibowo, 2023) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implementasi *collaborative governance* dalam pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, atau inovasi daerah secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis proses formulasi kebijakan daerah melalui pendekatan *collaborative governance* dengan mempertimbangkan dimensi sosial-budaya lokal masih relatif terbatas, terutama pada daerah dengan karakteristik masyarakat yang kuat seperti Kota Pariaman. Selain itu, penelitian mengenai bagaimana interaksi antara birokrasi, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga adat memengaruhi kualitas formulasi kebijakan daerah juga belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat *research gap* yang perlu diisi, yaitu masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan daerah yang mengintegrasikan aspek kelembagaan formal dan kearifan lokal di Kota Pariaman. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antaraktor dalam proses perumusan kebijakan daerah.

Merujuk pada latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman?; (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman?; serta (3) Bagaimana model kolaborasi yang sesuai untuk memperkuat kualitas birokrasi dan formulasi kebijakan di Kota Pariaman?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan model kolaborasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan efektivitas formulasi kebijakan daerah.

---

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam fenomena *collaborative governance* dalam formulasi kebijakan publik melalui interpretasi terhadap berbagai dokumen dan sumber informasi yang relevan (Creswell, 2018). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis proses keterlibatan berbagai aktor dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman secara sistematis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi Pemerintah Kota Pariaman, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwako), dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses formulasi kebijakan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang membahas *collaborative governance*, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan empat kriteria, yaitu: (1) memiliki relevansi dengan formulasi kebijakan di Kota Pariaman; (2) diterbitkan oleh lembaga resmi atau sumber ilmiah yang kredibel; (3) memuat informasi mengenai keterlibatan aktor pemerintah maupun non-pemerintah; dan (4) dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna menjamin aktualitas data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan Scopus.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antaraktor. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), yang mencakup dimensi *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, dan publikasi pemerintah. Selain itu, dilakukan *cross-check* antar sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas data sehingga hasil

---

penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2021).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Identifikasi Aktor dalam Formulasi Kebijakan di Kota Pariaman**

Hasil analisis terhadap dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2023–2026, LKPJ Wali Kota Pariaman, dan dokumen Musrenbang menunjukkan bahwa formulasi kebijakan di Kota Pariaman melibatkan tiga kelompok aktor utama, yaitu aktor pemerintah (state actors), sektor swasta (private sector), dan masyarakat sipil (civil society).

Aktor pemerintah terdiri atas Wali Kota, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki kewenangan formal dalam penyusunan dan penetapan kebijakan. Aktor ini berperan sebagai pengambil keputusan, penyedia sumber daya, sekaligus penanggung jawab implementasi kebijakan. Sementara itu, sektor swasta, khususnya pelaku usaha pariwisata dan UMKM, berperan memberikan masukan terkait pengembangan ekonomi daerah, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Pariaman.

Adapun masyarakat sipil terdiri atas lembaga adat LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kota Pariaman, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta akademisi yang berpartisipasi melalui forum konsultasi publik maupun Musrenbang. Keterlibatan lembaga adat menjadi karakteristik khas Kota Pariaman karena proses perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi landasan sosial masyarakat Minangkabau.

Temuan ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), bahwa pengambilan keputusan publik tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap isu yang dibahas. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Emerson et al., 2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun keterlibatan multipihak dalam proses kebijakan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berbagai aktor telah terlibat, pemerintah daerah masih memiliki posisi dominan dalam penentuan agenda dan pengambilan keputusan akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi yang terbentuk masih berada pada tahap government-led collaboration, di mana pemerintah tetap menjadi aktor sentral dalam proses formulasi kebijakan.

---

### Mekanisme Kolaborasi Antaraktor

Berdasarkan analisis dokumen RPJMD, LKPJ, dan regulasi daerah, terdapat tiga mekanisme utama yang digunakan Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun kolaborasi dalam formulasi kebijakan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik.

Musrenbang merupakan forum formal yang secara rutin dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kota. Forum ini berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat dan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, beberapa OPD juga melaksanakan FGD tematik yang melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk memperoleh masukan yang lebih spesifik terhadap rancangan kebijakan tertentu.

Pemerintah Kota Pariaman juga mulai memanfaatkan media digital dan kanal informasi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebijakan. Meskipun belum sepenuhnya berbasis e-participation, pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan proses perumusan kebijakan.

Dari perspektif teori Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), mekanisme tersebut telah memenuhi unsur institutional design dan face-to-face dialogue, yaitu tersedianya aturan main dan ruang interaksi yang memungkinkan aktor berpartisipasi secara aktif. Namun demikian, efektivitas forum tersebut masih dipengaruhi oleh kapasitas peserta, kualitas diskusi, serta kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi yang berkembang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lutfi (Lutfi, 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi proses perencanaan dan forum konsultasi publik dapat meningkatkan kualitas formulasi kebijakan, tetapi keberhasilannya tetap ditentukan oleh keterbukaan pemerintah dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia.

### Dinamika Interaksi Antaraktor

Analisis dokumen menunjukkan bahwa interaksi antaraktor dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman berlangsung secara dinamis dan ditandai oleh tiga pola hubungan, yaitu kooperatif, konflikktual, dan dominatif.

Pola kooperatif terlihat pada isu-isu pembangunan yang memiliki kepentingan bersama, seperti pengembangan sektor pariwisata, peningkatan ekonomi lokal, dan penyelenggaraan event budaya. Pada isu tersebut, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki tujuan yang relatif sama sehingga proses koordinasi berlangsung lebih mudah.

Sebaliknya, pola konflikktual muncul pada kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang, relokasi pedagang, maupun pengelolaan kawasan publik. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan kelompok masyarakat

---

tertentu sering kali memunculkan perdebatan dalam proses penyusunan kebijakan. Meskipun demikian, budaya musyawarah yang masih kuat di Kota Pariaman menjadi modal sosial yang membantu penyelesaian konflik secara lebih konstruktif.

Selain itu, pola dominasi pemerintah masih terlihat dalam proses pengambilan keputusan akhir. Walaupun aktor non-pemerintah diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, tidak seluruh aspirasi dapat diakomodasi menjadi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun belum sepenuhnya bersifat setara.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Howlett, Ramesh, dan Perl (Howlett et al., 2020) yang menyatakan bahwa formulasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beragam aktor dengan kepentingan, sumber daya, serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Dalam konteks Kota Pariaman, dinamika tersebut tercermin dalam proses interaksi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga adat yang tidak selalu berada pada posisi yang setara. Oleh karena itu, keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif, serta akses yang setara terhadap proses pengambilan keputusan menjadi faktor penting untuk mendukung terciptanya kolaborasi yang berkelanjutan dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Analisis Collaborative Governance Berdasarkan Model Ansell dan Gash**

Jika dianalisis menggunakan model Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008), implementasi collaborative governance dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman menunjukkan beberapa temuan penting.

Pertama, pada aspek starting conditions, Kota Pariaman memiliki kondisi awal yang relatif mendukung karena adanya budaya musyawarah, hubungan sosial yang erat, serta peran lembaga adat yang masih kuat. Modal sosial tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama antaraktor dan meminimalkan konflik yang berkepanjangan.

Kedua, pada aspek institutional design, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang, konsultasi publik, dan FGD. Namun, belum terdapat standar mekanisme kolaborasi yang seragam di seluruh OPD sehingga kualitas keterlibatan masyarakat masih bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang ada masih perlu diperkuat agar kolaborasi berlangsung secara lebih konsisten.

Ketiga, pada aspek facilitative leadership, peran kepala daerah dan Bappeda cukup dominan sebagai fasilitator yang menghubungkan kepentingan berbagai aktor. Kepemimpinan yang inklusif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kolaborasi dan mendorong aktor non-pemerintah untuk tetap berpartisipasi secara aktif. Temuan ini memperkuat penelitian Mulyadi (2024) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kolaboratif merupakan determinan utama keberhasilan collaborative governance di tingkat daerah.

Keempat, pada aspek collaborative process, proses dialog dan interaksi antaraktor telah berlangsung melalui berbagai forum formal maupun informal. Akan tetapi, aspek trust building masih menjadi tantangan utama. Tidak meratanya akses informasi dan perbedaan kapasitas antaraktor berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Rian (Rian, 2022) yang menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam formulasi kebijakan di Kota Pariaman telah berjalan dengan cukup baik, terutama ditinjau dari aspek keterlibatan multipihak dan budaya musyawarah yang mendukung proses kolaborasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dominasi pemerintah, belum seragamnya mekanisme partisipasi, dan masih terbatasnya pembangunan kepercayaan antaraktor menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Temuan ini sekaligus menjadi kontribusi penelitian, yaitu menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance di daerah tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh modal sosial dan integrasi nilai-nilai lokal dalam proses formulasi kebijakan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan publik di Kota Pariaman telah mengarah pada penerapan collaborative governance yang ditandai dengan keterlibatan aktor pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga adat dalam proses penyusunan kebijakan. Meskipun pemerintah daerah masih menjadi aktor dominan dalam pengambilan keputusan akhir, berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang, Focus Group Discussion (FGD), dan konsultasi publik telah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa keberhasilan collaborative governance di Kota Pariaman tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum atau desain kelembagaan formal, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh modal sosial masyarakat dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses kebijakan. Keberadaan lembaga adat serta budaya musyawarah yang kuat menjadi faktor pendukung penting dalam membangun dialog, mengurangi konflik, dan meningkatkan legitimasi kebijakan publik. Namun demikian, ketimpangan kapasitas antaraktor, dominasi pemerintah, dan belum optimalnya transparansi informasi masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kualitas kolaborasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian collaborative governance dengan menunjukkan bahwa model Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) tidak hanya dipengaruhi oleh aspek starting conditions, institutional

design, facilitative leadership, dan collaborative process, tetapi juga oleh konteks sosial-budaya lokal yang melekat pada masyarakat. Dengan demikian, penerapan collaborative governance di tingkat daerah perlu mempertimbangkan karakteristik sosial dan kelembagaan lokal sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi.

Secara praktis, Pemerintah Kota Pariaman perlu memperkuat regulasi dan standar mekanisme kolaborasi antaraktor, meningkatkan transparansi informasi kebijakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat dan organisasi non-pemerintah agar dapat berpartisipasi secara lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan peran lembaga adat perlu terus dikembangkan untuk menciptakan proses formulasi kebijakan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika collaborative governance dalam formulasi kebijakan publik di daerah.

## Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fauzi, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas birokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 145–158.
- Hidayat, R. (2021). Partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan daerah di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 55–67.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Lutfi, M. (2023). Digitalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sistem E-Planning. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Administrasi*, 7(1), 34–47.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2024). Transformasi Birokrasi dalam Penguatan Collaborative Governance di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(1), 1–15.

- 
- Pariaman, B. P. S. K. (2025). *Kota Pariaman dalam angka 2025*. BPS Kota Pariaman.
- Pratama, A. (2022). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penguatan Kapasitas Pemerintah Lokal. *Jurnal Otonomi Daerah Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 89–102.
- Rian, F. (2022). Trust Building dalam Implementasi Collaborative Governance. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 10(1), 60–72.
- Saputra, D. (2023). Tantangan Kolaborasi Antaraktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 9(2), 120–134.
- Wibowo, A. (2023). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 5(2), 101–113.
- Yunus, M. (2021). Peran Kearifan Lokal dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Sosial Budaya Dan Pemerintahan*, 4(1), 25–37.